

**PROYEKSI KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT
ERA PEMERINTAHAN BIDEN DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP DIPLOMASI INDONESIA**

**PROJECTION OF THE US FOREIGN POLICY IN JOE BIDEN ADMINISTRATION
AND ITS IMPLICATION TO INDONESIA'S DIPLOMACY**

Erlinda Matondang

PIA ARDHYA GARINI
(erlinda.matondang@gmail.com)

Abstrak – Terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden ke-46 Amerika Serikat (AS) membawa babak baru dalam hubungan internasional. Sejumlah kebijakan baru sudah dirilis oleh Pemerintahan Biden walaupun untuk implementasinya mungkin akan berjalan secara efektif pada tahun 2022 atau saat masa transisi pemerintahan sudah berakhir. Dalam kebijakan luar negeri AS tersebut, tidak satu pun kawasan menjadi prioritas utama dan Pemerintahan Biden cenderung menunjukkan fokusnya dalam perbaikan kondisi domestik dan pemulihan kerja sama dengan beberapa entitas internasional. Sebagai salah satu negara maju dan besar di tataran internasional, perubahan kebijakan luar negeri AS juga berimplikasi terhadap Indonesia. Dengan netralitas dalam menanggapi perseteruan antara AS, Rusia, dan China, Indonesia mempunyai nilai dan posisi strategis dalam kebijakan luar negeri AS. Posisi strategis Indonesia dalam kebijakan luar negeri AS tidak hanya didorong oleh netralitasnya, tetapi juga peran aktifnya dalam berbagai forum internasional. Bahkan, Indonesia akan menyandang gelar pemimpin G20 pada 2022 dan ketua ASEAN pada 2023. Dengan gambaran situasi dan kondisi tersebut, penulis merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia untuk tetap memelihara kerja sama yang sudah terjalin dengan AS sekaligus memantau perkembangan kebijakan luar negeri AS pasca-masa transisi pemerintahan. Bersamaan dengan itu, pemerintah Indonesia dapat memetakan dan merencanakan kerja sama bilateral, regional, dan multilateral dengan AS yang dapat dicapai pada masa kepemimpinannya di G20 pada tahun 2022 dan keketuaannya di ASEAN pada tahun 2023.

Kata Kunci : diplomasi, kebijakan luar negeri, kerja sama bilateral, posisi strategis

Abstract – The election of Joe Biden as the 46th President of the United States (US) brings the new chapter in international relations. A number of new foreign policies have been released by Joe Biden Administration although its implementation may run effectively in 2022 or when the transitional government period is over. In the newest US Foreign policy, there is no regional focus as the main priority and the Joe Biden Administration tends to show the improvement of domestic conditions and restoring cooperation with several international entities as the focus. As one of developed and great countries in the international system, the changes of US foreign policy also have implications for Indonesia. By its neutrality on responding the feud between US, Russia, and China, Indonesia builds its strategic value and position in US foreign policy. Moreover, Indonesia continuously shows its active participation in various international forum. Indeed, Indonesia is going to hold the presidency of G20 2022 and the chairmanship of ASEAN 2023. By these situation and condition, the author recommends the Indonesian government to continually maintain the existing cooperation with the US as well as to monitor the development of US foreign policy post-transitional government period. In line with it, the Indonesian government should map and plan the bilateral, regional, and multilateral cooperation with the US that can be achieved during its presidency of G20 2022 and chairmanship of ASEAN 2023.

Keywords: bilateral cooperation, diplomacy, foreign policy, strategic position

Pendahuluan

Indonesia nyaris tidak menjadi prioritas dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS) pada masa pemerintahan Donald Trump. Namun, dengan kemenangan Joe Biden dalam pemilihan presiden AS, ada secercah harapan untuk memperbaiki hubungan AS-Indonesia yang sempat meredup. Sebagaimana kebijakan luar negeri Barack Obama, Joe Biden, yang pada masa pemerintahan Obama menjabat sebagai wakil presiden, diperkirakan akan mempunyai kebijakan serupa.

Namun, kondisi saat ini yang berbeda saat pemerintahan Obama berlangsung memerlukan kebijakan yang berbeda. Apalagi pemikiran Biden terbilang kontra dengan pemikiran Trump yang inklusif. Dengan kata lain, Biden dipastikan akan mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan Trump. Tidak hanya untuk diterapkan di dalam negeri, tetapi juga dalam menjalin hubungan dengan negara lainnya.

Indonesia sebagai salah satu negara di Asia Tenggara yang menjalin hubungan baik dengan AS, baik secara politik, keamanan, maupun ekonomi, mempunyai peluang yang cukup baik untuk mengoptimalkan hubungannya dengan AS. Namun, dengan situasi dunia terkini yang dilanda krisis dan juga pandemi, serta instabilitas sosial AS, Indonesia harus menggunakan peluang dengan

memanfaatkan posisi strategisnya dalam kebijakan AS pada masa pemerintahan Biden.

Artikel ini ditulis untuk menganalisis proyeksi kebijakan luar negeri Amerika Serikat era pemerintahan Biden dan implikasinya terhadap diplomasi Indonesia. Posisi strategis ini dapat menjadi langkah awal dalam menentukan peluang yang akan digunakan dan kebijakan luar negeri terhadap AS yang dipilih oleh pemerintah Indonesia. Selain itu, analisis posisi strategis ini juga dapat menjadi bagian dari kajian terhadap strategi Indonesia dalam hubungan dengan negara-negara lainnya, terutama negara sekutu AS, baik di tataran regional maupun internasional.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berpegang pada data sekunder berbentuk dokumen resmi pemerintah AS, pemerintah Indonesia, artikel jurnal, dan pemberitaan di media elektronik. Data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan metode studi pustaka.

Analisis dalam artikel ini menggunakan teori Analisis Kebijakan Luar Negeri (*Foreign Policy Analysis/FPA*) yang dikombinasikan dengan komparasi kebijakan luar negeri AS dan Indonesia. Analisis dengan menggunakan metode komparasi bertujuan untuk menentukan

strategi yang tepat untuk Indonesia dalam menghadapi kebijakan luar negeri AS.

Penelitian Terdahulu

Ada dua artikel penelitian tentang hubungan Indonesia dan AS dalam masa Pemerintahan Biden yang menjadi dasar penulisan artikel ini. Kedua artikel tersebut tidak secara khusus membahas hubungan Indonesia-AS dalam masa Pemerintahan Biden, tetapi pembahasannya cukup menjadi dasar untuk penulisan artikel ini. Pertama adalah artikel yang dimuat dalam *Info Singkat: A Brief Study of Actual and Strategic Issues* dengan judul “*The United States Policy Directions under President Joe Biden.*” Kedua, artikel berjudul “*The Impending Biden Presidency and Southeast Asia*” yang dimuat dalam ISEAS Yusof Ishak Institute.

Dalam artikel yang pertama, kerja sama Indonesia-AS berpotensi semakin meningkat dengan penandatanganan kembali Perjanjian Paris. Artikel ini memuat sejumlah potensi peningkatan hubungan Indonesia-AS, khususnya di bidang perdagangan dan pembangunan ekonomi. Sorotan artikel ini berbeda dengan artikel tulisan Lisbet tersebut. Artikel ini meninjau posisi strategis Indonesia dalam kebijakan luar negeri AS tanpa berfokus pada bidang tertentu.

Sementara itu, artikel kedua membahas hubungan Indonesia-AS dalam dua paragraf khusus. Didalam paragraf

tersebut, Ian Storey dan Malcolm Cook menyatakan bahwa Pemerintahan Biden akan memberikan nuansa yang berbeda pada hubungan Indonesia-AS jika dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Pemerintah Indonesia dinyatakan mempunyai peluang untuk mendorong peningkatan investasi dari AS. Namun, isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua tetap akan menjadi sorotan pemerintah AS.

Artikel kedua tersebut tidak membahas secara rinci peluang kerja sama, sedangkan artikel ini membahas peluang kerja sama Indonesia-AS sekaligus melihat posisi Indonesia dalam kerangka kerja sama tersebut. Peluang ini ditinjau dari fokus kebijakan luar negeri Indonesia saat ini.

Kerangka Pemikiran

Kebijakan luar negeri suatu negara dan kondisi terkini dalam hubungan internasional kerap kali dikaji dengan menggunakan pendekatan atau teori pembuatan kebijakan (*Foreign Policy Decision Making/FPDM*) yang dicetuskan oleh Richard Snyder dan rekan-rekannya. Menurut Snyder dan rekan-rekannya, penjelasan terbaik seharusnya mempunyai determinan yang bersifat multilevel, multikausal, dan menggabungkan informasi dari berbagai sistem dalam ilmu sosial. Pendekatan ini juga disebut sebagai kebiasaan organisasional (*organizational*

behaviour). (Hudson, 2007, 15–16)

Pemikiran yang lebih kompleks disampaikan oleh James Rosenau. Dalam teori yang dicetuskan oleh Rosenau, kebijakan luar negeri harus dipahami secara menyeluruh, dengan mengintegrasikan informasi berbagai level analisis, mulai dari karakter pemimpin hingga sistem internasional (Hudson, 2007, 16). Menurutnya, fenomena dalam analisis kebijakan luar negeri difokuskan pada kondisi tertentu yang sedang dihadapi oleh suatu negara (Rosenau, 1968, 298). Oleh karena itu, studi komparatif diperlukan untuk mengetahui gambaran utuh kebijakan luar negeri dari suatu negara. Apalagi dengan adanya ketergantungan antara nasional dan internasional, pemerintah dan aktor non-pemerintah dari suatu negara berkaitan langsung dengan sistem internasional pada hal tertentu (Rosenau, 1968, 309).

Dalam teorinya, Rosenau menjelaskan bahwa ada tiga jenis variabel dalam analisis hubungan luar negeri, yaitu variabel bebas (*independent variables*) terdiri dari faktor internal dan eksternal yang mendorong pembentukan kebijakan luar negeri suatu negara; variabel yang mengintervensi (*intervening variables*) terdiri dari prosedur, kapabilitas, dan konflik antar-pembuat kebijakan; dan variabel terikat (*dependent variables*) terdiri dari ketetapan atau perubahan sikap internal dan eksternal terhadap

kebijakan luar negeri (Rosenau, 1968, 312–314).

Analisis dalam artikel ini tidak sekompleks teori yang dikemukakan oleh Rosenau. Pendekatan yang digunakan mengarah pada FPDM ala Snyder dengan tinjauan pada lima level analisis, yaitu individu (*individual decision-making*), kelompok (*group decision-making*), budaya dan identitas nasional, politik dalam negeri dan pihak oposisi, dan atribut negara dalam sistem internasional. Untuk memahami suatu kebijakan luar negeri dan fenomena dalam hubungan internasional, kelima level ini saling berkaitan.

Individual Decision Making

Kajian pada tataran individual biasanya dilaksanakan dengan mempertimbangkan rezim yang berkuasa, minat pemimpin pada hal-hal yang berkaitan dengan politik luar negeri, situasi yang tidak menentu, latar belakang pendidikan atau pelatihan diplomatik yang pernah dijalani oleh pemimpin, keahlian pemimpin dalam isu-isu hubungan internasional tertentu, gaya kepemimpinan, dan pengaruh dari orang-orang di sekitar pemimpin (Hudson, 2007, 38–39).

Penanganan isu dan pengambilan keputusan dalam menghadapi kompleksitas hubungan internasional ditentukan oleh kemampuan kognitif seorang pemimpin (Alden & Aran, 2017,

40). Hal ini yang menyebabkan kebijakan luar negeri dapat dianalisis melalui pendekatan psikologis pemimpin suatu yang meliputi kemampuannya mengambil kebijakan dalam situasi krisis, *stereotype*, keterbatasan dalam budaya-bahasa, dan volume informasi yang diperoleh (Alden & Aran, 2017, 24).

Group Decision Making

Pada tataran kelompok, analisis diklasifikasikan kedalam tiga hal, yaitu dinamika kelompok kecil, proses dalam organisasi dan birokrasi. Pengambilan kebijakan dalam kelompok kecil biasanya dilaksanakan untuk isu-isu yang membutuhkan penanganan pada level tertinggi atau situasi krisis (Hudson, 2007, p. 66). Analisis pada level ini dilaksanakan dengan mengidentifikasi organisasi-organisasi yang mempunyai kepentingan dan keterlibatan beserta dengan tingkat kemampuannya dan sumber dayanya. Hal ini akan mengarah kepada kemampuan organisasi tersebut untuk melaksanakan kebijakan luar negeri (Hudson, 2007, pp. 75-76).

Birokrasi merupakan hal level yang paling rumit karena di dalamnya terdapat kompleksitas dari pembuatan kebijakan secara kelompok kecil, proses organisasi, dan tekanan politik dalam negeri. Dalam birokrasi, kebijakan luar negeri yang diambil selalu mudah ditebak karena pembuatannya berdasarkan pada rutinitas (Hudson, 2007, 89).

Budaya dan Identitas Nasional

Pemerintah suatu negara membutuhkan pengenalan terhadap budaya dan identitas nasionalnya dalam memahami tujuan politik di tataran internasional. Pemahaman terhadap tujuan politik tersebut yang menjadi dasar pembentukan kebijakan luar negeri sebagai instrumen sekaligus koridor pencapaian kepentingan suatu negara di tataran internasional. Pengenalan budaya dan identitas nasional dari negara lain juga menjadi kunci pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara. Melalui pengenalan budaya dan identitas nasional tersebut, suatu negara dapat memahami strategi atau tindakan dari negara lain. Namun, identitas nasional tidak dapat menjadi pegangan baku dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Identitas nasional merupakan hal politik yang dibentuk secara berulang-ulang melalui mesin berupa interaksi antar-rakyat (Hudson, 2007, 105).

Politik Dalam Negeri dan Pihak Oposisi

Politik dalam negeri suatu negara tidak hanya ditentukan oleh rezim yang berkuasa, tetapi juga pihak oposisi, media, kelompok pemangku kepentingan, dan aktor internasional, termasuk perusahaan multinasional dan pengadilan internasional (Hudson, 2007, 127-128). Persaingan antara oposisi dan rezim yang berkuasa dapat memberikan

dampak yang berbeda, tergantung pada strategi yang diterapkan oleh pemerintah (rezim yang berkuasa) untuk mengusung kompetisi tersebut. Baik menerima maupun menolak masukan dari pihak oposisi, keduanya memberikan dampak terhadap kebijakan luar negeri suatu negara. (Hudson, 2007, 135)

Atribut Nasional dan Sistem Internasional

Atribut nasional yang memengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara dapat ditinjau melalui sumber daya, geografi, populasi, karakteristik, ukuran, dan lain sebagainya. Atribut nasional ini bersifat relatif. Dalam hal ukuran, suatu negara kecil akan cenderung memilih sikap netral dan diplomatis dalam pertikaian antara dua negara besar (Hudson, 2007, 144). Sementara itu, negara besar cenderung akan bersikap lebih aktif dalam hubungan internasional, tetapi sulit untuk bergabung dengan negara lainnya. Negara besar juga cenderung untuk mengambil lebih banyak sumber daya, tidak hanya mineral, tetapi juga hasil pertanian dan sumber daya lainnya (Hudson, 2007, 145).

Berkaitan dengan kepemilikan sumber daya, suatu negara dapat berseteru dengan negara tetangganya untuk mendapatkan akses yang lebih luas terhadap sumber daya yang tersedia (Hudson, 2007, 145-146). Hal ini dapat dilihat dari perseteruan antara India dan Pakistan untuk mendapatkan sumber daya air.

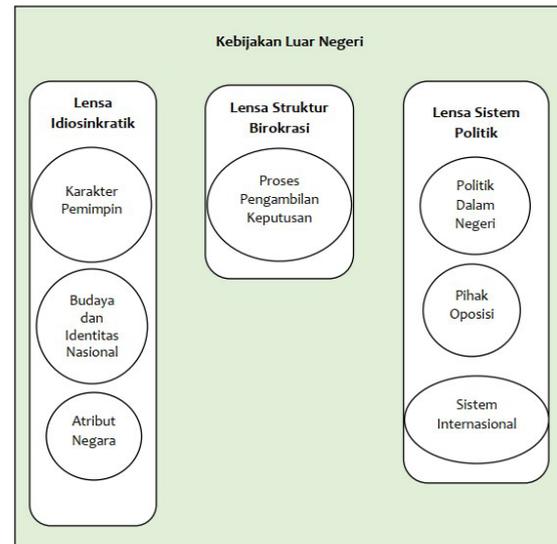
Selain itu, geografi, demografi sistem politik, dan kapabilitas militer menjadi atribut nasional yang sangat dipertimbangkan di tataran internasional. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya Gerakan saling menyerang antara sesama negara demokratis, yang disebut “*democratic-peace*” (Hudson, 2007, 146-150)

Sementara itu, sistem internasional dapat memengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri karena mempunyai beberapa atribut penting, seperti jumlah aktor yang terlibat, distribusi kekuasaan, ketiadaan organisasi supranasional yang mengatur setiap negara yang ada di dunia, dan sebagainya (Hudson, 2007, 153-154). Namun, setidaknya ada lima determinan atau faktor yang menentukan politik luar negeri suatu negara, yaitu pencegahan (*deterrence*), perlombaan senjata (*arm races*), kejutan strategis, formasi aliansi, dan jenis rezim seteru. Faktor pencegahan atau *deterrence* tidak hanya berkaitan dengan kekuatan militer, tetapi juga ekonomi dan politik. Hubungan ketergantungan antara suatu negara dengan negara yang superior akan memunculkan komitmen yang menyebabkan berkurangnya kemungkinan akan diserang oleh negara superior tersebut (Mintz & DeRouen, 2010, 122). Sebagai contoh, sangat kecil kemungkinan Filipina akan diserang oleh Amerika Serikat karena saat ini Amerika

Serikat juga membangun pangkalan militer di wilayah perairan Filipina.

Hal yang sama juga terjadi dalam aliansi militer yang beranggotakan negara maju dan berkembang. Aliansi militer tidak hanya bertujuan untuk menghindari serangan dari negara superior, tetapi juga untuk meningkatkan *deterrence*. Sedikit berbeda dengan aliansi militer yang dampaknya terlihat secara eksplisit melalui perjanjian kerja sama, kesamaan ideologi menunjukkan penurunan risiko penyerangan dari negara superior tanpa perlu dokumen pengikat apapun. Sebagai contoh, sebuah negara demokrasi tidak akan menyerang negara demokrasi lainnya karena adanya prinsip demokrasi yang mengutamakan penyelesaian secara damai dibandingkan penggunaan kekerasan (Mintz & DeRouen, 2010, 127).

Sementara itu, kejutan strategis dapat menimbulkan tekanan, informasi yang ambigu, dan ketidaksiapan karena kurangnya pengalaman. Dengan kata lain, kejutan strategis juga memengaruhi politik luar negeri suatu negara. Namun, politik luar negeri juga dapat dibentuk untuk mengatasi kejutan strategis ini (Mintz & DeRouen, 2010, 125).



Gambar 1. Bagan Lensa Analisis

Sumber : Diolah oleh Penulis, 2021

Faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara tersebut dapat disederhanakan ke dalam tiga lensa analisis, yaitu idiosinkratik, struktur birokrasi, dan sistem politik. Idiosinkratik menjadi lensa yang akan menyoroti latar belakang pemimpin suatu negara beserta kebijakannya. Struktur birokrasi menjadi lensa yang menyoroti proses pengambilan keputusan hingga implementasinya di suatu negara. Sementara itu, sistem politik menjadi lensa yang tidak hanya berfokus pada politik dalam negeri, tetapi juga politik dalam sistem internasional. Ketiga lensa ini akan digunakan sebagai pisau analisis dalam artikel ini.

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat

Tidak berselang lama setelah pelantikan Presiden Joe Biden, laman *website*

White House merilis prioritas kebijakan pemerintah AS. Dari tujuh prioritas kebijakan pemerintahan AS, poin terakhir menunjukkan ambisinya untuk kembali aktif dalam penanganan isu-isu global dengan sorotan pada peningkatan kekuatan keamanan nasional AS, pembentukan aliansi negara-negara demokratis, isu hak asasi manusia, dan keterlibatan dalam pembangunan ekonomi global (*The Biden-Harris Administration Immediate Priorities*, 2021). Tindakan-tindakan yang diambil dalam pelaksanaan kebijakan ini juga dijelaskan oleh Presiden Joe Biden dalam pidatonya yang berfokus pada posisi AS di dunia (*The White House Briefing Room*, 2021). Dalam pidatonya tersebut, Joe Biden menekankan kebijakan luar negerinya yang ditandai dengan slogan “America is back”.

Dalam pidato tersebut, isu demokrasi menjadi fokus utama. Bahkan, demokrasi juga menjadi latar belakang penentuan tindakan dan sikap pemerintah AS terhadap isu global. Salah satunya adalah pelanggaran HAM melalui kepemimpinan militer yang membatalkan hasil pemilihan umum dan penembakan warga sipil di Myanmar. Presiden Joe Biden juga menyoroti kasus Alexei Navalny.

Demokrasi sepertinya menjadi salah satu poin penting dalam Pemerintahan Biden. Hal ini diindikasikan dengan

tindakannya menghubungi negara aliansi seperti Kanada, Meksiko, Inggris, Jerman, Australia, Jepang, Prancis, Korea Selatan, dan negara-negara anggota *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) lainnya untuk membahas pertemuan atau diskusi terkait dengan isu demokrasi. Presiden Biden berniat mengadakan *Democracy Summit* dengan konsep seperti *Nuclear Security Summit* pada tahun pertama kepemimpinannya. Jika pertemuan ini terlaksana, Presiden Biden mampu memegang komitmennya yang sudah disampaikan sejak masa kampanye (Biden, 2020).

Dengan mengatasnamakan demokrasi pula, Presiden Joe Biden mengambil kebijakan untuk mengakhiri keterlibatan AS dalam konflik di Yaman. Presiden Joe Biden berniat untuk menghentikan bantuan AS kepada Arab Saudi dalam melancarkan operasi ofensif dalam konflik Yaman. Bahkan, Presiden Joe Biden mendorong penanganan kasus melalui UN dan pengembalian proses negosiasi yang sempat terhenti.

Pemerintahan AS di bawah Presiden Joe Biden juga memperbaiki hubungan dengan beberapa entitas internasional. Beberapa minggu setelah kepemimpinannya, Joe Biden menandatangani Kembali Paris Climate Agreement dan membangun kembali hubungan baik dengan World Health Organization (WHO). Hubungan AS-WHO

yang sempat memburuk selama pandemi pada masa pemerintahan Donald Trump diharapkan dapat menjadi kunci penanganan pandemi di AS.

Di bidang pertahanan dan keamanan, kebijakan luar negeri AS berpegang pada tiga pilar, yaitu adaptasi NATO sebagai kunci pening dalam menghadapi sikap Rusia yang agresif dan pengaruh China; kerja sama AS-Uni Eropa yang membutuhkan re-evaluasi peranan dan hubungan dengan anggota Uni Eropa, dan upaya untuk mendorong kerja sama negara-negara demokratis yang berada di Eropa dan Indo-Pasifik untuk menekan kemunculan otoritarianisme (Soare, 2021, 17–18). Dalam implementasi kebijakan tersebut, AS melakukan peninjauan kembali terhadap *Global Posture Review* untuk menentukan keputusan penarikan pasukannya dari wilayah Jerman. Selama peninjauan kembali dilakukan, proses penarikan pasukan, yang diinisiasi pada masa pemerintahan Donald Trump, dihentikan (Biden, 2020). Pemerintahan Biden juga membangun kembali aliansinya di Asia Timur. Penguatan aliansi dengan Korea Selatan (Korsel) dan Jepang tidak hanya bertujuan untuk mendorong pendekatan terkoordinasi terhadap Korea Utara (Korut) (Dalton, 2021, 2), tetapi juga mengimbangi pengaruh China di kawasan Indo-Pasifik (Sasakawa USA, 2021, 2). Bahkan, kerja sama Jepang dan AS akan ditekankan pada empat bidang, yaitu

teknologi, pengaturan ekonomi digital, pemberian subsidi, dan infrastruktur (Sasakawa USA, 2021, 2–5).

Upaya mengimbangi pengaruh China di Asia juga dilaksanakan dengan pembentukan kerja sama pertahanan dan aliansi dengan beberapa negara lain, seperti aliansi trilateral dengan Australia dan Inggris (AUKUS); dan aliansi empat negara dengan Australia, Jepang, dan India (Quad). Selain itu, Biden juga mengumumkan rencana pengkajian ulang strategi keamanan nasional AS, khususnya yang berkaitan dengan China (Shesgreen & Hjelmgaard, 2021). Bahkan, dalam rencana anggaran pertahanan pemerintahan Biden 2022, upaya pengimbangan kekuatan dan pengaruh China menjadi prioritas utama (Matthew, 2021, p. 4).

Tidak hanya di bidang pertahanan, upaya mengimbangi pengaruh China juga dilakukan di bidang lainnya. Pemerintahan Biden menjanjikan pengembangan teknologi AS, termasuk pengembangan kereta cepat dan kendaraan elektrik, yang saat ini menjadi teknologi kunci China (Shesgreen & Hjelmgaard, 2021). Biden juga mulai memberikan perhatian ke negara-negara Afrika yang ditunjukkan dengan kehadirannya dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Uni Afrika. Ini mengindikasikan adanya perhatian khusus yang diberikan pemerintahan Biden terhadap hubungannya dengan Afrika

yang sudah lama mengalami penurunan intensitas. Sejak tahun 2010, perdagangan AS-Afrika menurun lebih dari 50% dan hanya terjadi dua kali kunjungan ke benua Afrika (Rattner & Whitmore, 2021, pp. 3–4). Sementara itu, China menjadi rekan dagang terbesar negara-negara di Benua Afrika dengan nilai investasi dan proyek konstruksi sekitar \$2 triliun sejak tahun 2005 (Rattner & Whitmore, 2021, 4).

Negara kompetitor lainnya yang menjadi objek kebijakan luar negeri AS adalah Rusia. Dalam menghadapi Rusia, Presiden Biden mendorong pembentukan koalisi dan koordinasi untuk mencapai kepentingan bersama, seperti dalam proliferasi nuklir dengan memperpanjang pemberlakuan *NewSTART Treaty*. Namun, Presiden Biden berjanji akan menghalangi keterlibatan Rusia dalam pemilihan umum AS dan menghentikan serangan sibernya (Usher, 2021).

Seluruh kebijakan keamanan AS mengacu pada *Interim National Security Strategy Strategic Guidance* (INSSG) yang diterbitkan pada 3 Maret 2021. INSSG mengidentifikasi tiga prioritas kunci, yaitu : (1) perlindungan keamanan warga sipil AS melalui pencegahan ancaman dari negara besar lain, musuh regional, ekstremis, dan ancaman transnasional lainnya, termasuk perubahan iklim, penyakit menular, serangan siber, dan informasi palsu; (2) pengembangan ekonomi melalui pemaknaan ulang

kepentingan ekonomi dalam hal standar hidup pekerja; (3) memproyeksikan dan mempertahankan nilai-nilai AS melalui penguatan demokrasi, baik pada tataran domestik maupun internasional (Matthew, 2021, 2). Dengan demikian, kebijakan keamanan AS juga meliputi isu lain, termasuk perubahan iklim.

Komitmen pemerintah Biden dalam penanganan perubahan iklim sudah menjadi sorotan sejak kembalinya AS pada Perjanjian Perubahan Iklim Paris. Apalagi Biden mengundang 40 kepala negara dan pemerintahan dalam pertemuan iklim virtual pada 22 April 2021. Dalam pertemuan tersebut, Biden menekankan bahwa perubahan iklim menjadi salah satu isu prioritas dalam agenda politiknya. Bahkan pemerintahan Biden berkomitmen untuk menjadi negara netral iklim pada tahun 2050. (Berretta et al., 2021, 1).

Dengan demikian, kebijakan luar negeri AS di masa Pemerintahan Biden tidak berfokus pada suatu wilayah atau kawasan tertentu seperti pada masa pemerintahan Barack Obama yang berfokus pada kawasan Asia Pasifik. Namun, dari berbagai sikap dan kegiatan AS di tataran internasional, pemerintah Biden seolah mengisyaratkan fokusnya pada Benua Afrika dan Asia secara bersamaan. Pemerintahan Biden berfokus pada perbaikan kondisi dalam negeri dan posisi tawar AS dalam hubungan

internasional. Selain itu, Joe Biden menaruh fokus pada pemulihan ekonomi dan kesehatan yang masih berkuat dalam penanganan pandemi Covid-19.

Analisis Kebijakan Luar Negeri AS

Fokus kebijakan hampir setiap negara di dunia saat ini adalah pemulihan kondisi sosial dan ekonomi dalam negerinya setelah dilanda pandemi sejak akhir tahun 2019. Namun, AS mempunyai tugas yang lebih berat dalam mengatasi kondisi sosial dan politiknya. Perpecahan yang terjadi sepanjang pemilihan umum presiden dan kemunculan isu rasialisme sejak pemerintahan Donald Trump menjadi salah satu fokus utama Pemerintahan Biden, selain penanganan pandemi Covid-19 yang juga dilakukan oleh seluruh negara di dunia. Apalagi dengan adanya perpecahan yang terjadi sepanjang proses pemilihan presiden AS 2020. Kebijakan ini sepenuhnya wajar dengan alasan pentingnya legitimasi dari masyarakat terhadap pemerintahan yang berkuasa.

Dari tujuh prioritas kebijakan Biden, hanya ada satu poin yang mengarah pada hubungannya dengan negara lain. Namun, dari implementasi kebijakan luar negeri tersebut, beberapa isu masih ditangani menggunakan perspektif kebijakan Trump, khususnya yang berkaitan dengan hubungan AS-Rusia dan AS-China.

Jika mempertimbangkan kondisi internal Pemerintahan Biden saat ini

yang secara keuangan masih bergantung pada anggaran yang diajukan pada masa pemerintahan Trump, perubahan kebijakan yang signifikan mungkin akan terjadi masa mendatang. Kebijakan Joe Biden yang sesungguhnya dapat terlihat jelas pada tahun 2022, termasuk kebijakan luar negeri di bidang pertahanan. Hal ini sudah terlihat dalam rencana anggaran keamanan dan pertahanan tahun 2022 yang menunjukkan bahwa prioritas diarahkan pada upaya menghalangi pengaruh China.

Penarikan pasukan AS dari Afghanistan dan penghentian bantuan operasi militer di Yaman dapat disinyalir sebagai bentuk komitmen terhadap upaya perdamaian. Kebijakan ini juga mendukung pengalihan anggaran nasional untuk pembangunan ekonomi AS yang sempat merosot drastis di pemerintahan periode sebelumnya dan juga manuver politik luar negeri. Bahkan, ada kemungkinan AS akan mengikuti pola politik luar negeri China yang melakukan pendekatan diplomatis, ekonomi, dan sosial-budaya. Hal ini ditunjukkan dengan aktifnya AS memberikan bantuan vaksin kepada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Selain itu, AS mendorong kemandirian perekonomian nasionalnya dengan meningkatkan produktivitas kalangan menengah.

Hal yang menarik, pemerintahan Biden menginisiasi pelaksanaan

Democracy Summit sebagai bagian dari aliansi baru. Kebijakan ini seolah membenarkan konsep *democratic peace*. Anggota dari pertemuan itu sebagian besar merupakan negara aliansi AS. Jika *Democracy Summit* dilaksanakan AS hanya dilaksanakan untuk negara anggota NATO, dapat dipastikan hasil dari pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan visi, misi, dan program NATO. Jika tujuan AS adalah untuk menjaring kerja sama yang lebih luas, fleksibilitas dari keanggotaan *Democracy Summit* menjadi kuncinya karena banyak negara berkembang yang menganut demokrasi merupakan anggota dari Gerakan Non-Blok (GNB).

Kebijakan-kebijakan di atas menunjukkan kelima determinan dari politik luar negeri, yaitu daya tangkal, perlombaan senjata, aliansi, kejutan strategis, dan rezim seteru. Penarikan pasukan dari negara lain dan pembentukan aliansi demokrasi menjadi daya tangkal baru untuk AS. Penguatan keamanan dalam negeri dan juga penguatan kerja sama pertahanan luar negeri membentuk keseimbangan untuk kebijakan luar negeri AS. Namun, belum ada kejutan strategis yang diberikan AS dalam posisinya di tataran internasional. Bahkan, pembentukan *Democracy Summit* yang masih dalam tahap persiapan juga belum menunjukkan kejutan strategis.

Secara personal, Joe Biden mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni dalam menjalin hubungan politis dengan negara lain. Selain itu, orang-orang yang dipercaya menjadi bagian dari pemerintahannya mempunyai pengalaman kerja bersama dalam pemerintahan Barack Obama. Hal ini menunjukkan adanya sinergi antara pemikiran Biden dan orang-orang yang menduduki jabatan utama dalam pemerintahannya. Sementara itu, partai oposisi tidak akan mengambil sikap bertentangan yang signifikan dalam waktu dekat karena kebijakan Biden yang masih mengakomodasi beberapa pemikiran dari Partai Republik yang sudah diimplementasikan sejak masa pemerintahan Donald Trump.

Kemenangan Partai Demokrat dalam pemilihan umum di AS mengindikasikan keselarasan langkah antara eksekutif dan legislatif AS. Biden diperkirakan tidak mendapatkan tantangan yang terlalu besar, baik dalam penetapan dan penggunaan anggaran maupun dalam penentuan kebijakan luar negeri. Friksi politik akan muncul, khususnya dalam isu rasialisme, sebagai akibat dari proses pemulihan pasca-perpecahan politik di AS, tetapi diperkirakan tidak berdampak signifikan pada kebijakan AS.

Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Memasuki periode kedua pemerintahan Joko Widodo, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) mengeluarkan Rencana Strategis (Renstra) 2020—2024. Didalam Renstra 2020-2024, prioritas politik luar negeri bertumpu pada Prioritas 4+1, yaitu Penguatan Diplomasi Ekonomi; Diplomasi Perlindungan; Diplomasi Kedaulatan dan Kebangsaan; Peningkatan Kontribusi dan Kepemimpinan Indonesia di Kawasan dan Dunia; plus Penguatan Infrastruktur Diplomasi (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2020, 114).

Dalam rangka penguatan diplomasi ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi defisit perdagangan, Kemlu RI mendapatkan mandat dari Presiden Joko Widodo untuk mengoptimalkan hubungan Indonesia dalam ketidakstabilan ekonomi global dan perang dagang AS-Tiongkok; mengamankan komoditas unggulan Indonesia; dan mendorong kapitalisasi pasar dalam negeri sebagai instrumen politik luar negeri (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2020, 114). Pencapaian diplomasi ekonomi Indonesia pada tahun 2020—2024 dinilai berdasarkan indikator utama, yaitu peningkatan nilai perdagangan dengan sejumlah negara akreditasi, investasi asing dan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia (Kementerian Luar Negeri Republik

Indonesia, 2020, 120). Sementara itu, dalam Pidato Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno L.P. Marsudi, langkah strategis yang ditempuh dalam diplomasi ekonomi Indonesia meliputi kapitalisasi penguatan pasar domestik dengan kewaspadaan terhadap pelanggaran-pelanggaran aturan perdagangan internasional di tengah kemerosotan ekonomi global; penguatan pasar tradisional dan terobosan pasar non-tradisional di kawasan Afrika, Amerika Latin, Asia Selatan, Asia Tengah, Timur Tengah, dan Pasifik; penguatan perundingan perdagangan dan investasi; promosi terpadu perdagangan dan investasi serta mendorong *Outbond Investment*; optimalisasi menjaga kepentingan strategis ekonomi Indonesia, termasuk menolak diskriminasi industri kelapa sawit Indonesia; dan mendorong industri 4.0 (industri digital, ekonomi kreatif, dan pengembangan SDM Indonesia) (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019, 4–6).

Sejalan dengan itu, Kemlu RI juga membangun Portal Peduli WNI dan *Safe Travel* dalam rangka membangun sistem perlindungan. Kemlu RI juga berencana untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri melalui transformasi digital serta penguatan kapasitas sumberdaya manusia di Kemlu RI dan Perwakilannya. Dalam target kinerja Kemlu RI, indikator dari

diplomasi perlindungan meliputi tingkat kepuasan pelayanan publik, termasuk di bidang protokoler, kekonsuleran, diplomatik, dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI); serta tingkat penyelesaian kasus WNI (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2020, 121). Selain itu, Kemlu RI juga mendorong upaya pencegahan perdagangan manusia melalui penguatan edukasi publik dan mendorong tata kelola migrasi yang aman melalui forum kerja sama internasional.

Diplomasi kedaulatan dan kebangsaan mengarah pada upaya diplomasi perbatasan dan pembangunan citra Indonesia di dunia internasional. Upaya diplomasi ini membutuhkan penegakan dan pengamanan kedaulatan Indonesia, baik di wilayah udara, laut, dan perbatasan sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan internasional. Selain itu, Kemlu RI juga mendorong upaya penyelesaian perundingan perbatasan maritim dengan sejumlah negara. Hal ini sejalan dengan misi penguatan keamanan laut Indonesia sebagai negara maritim.

Pada periode 2020—2024, Indonesia menduduki posisi sebagai ketua dalam beberapa organisasi internasional. Pada Agustus 2020, Indonesia menjabat sebagai ketua Dewan Keamanan PBB dengan memfokuskan pembahasan kerja sama di bidang *counter terrorism*. Di tahun yang sama, Indonesia menjadi ketua *Foreign Policy and Global Health (FPGH)* dengan

mengusung tema “Affordable Health Care”. Setelah menyelesaikan misinya di Dewan Keamanan PBB pada akhir 2020, Indonesia akan menjadi Dewan HAM PBB Periode 2021—2022. Setelah itu, Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN sekaligus Ketua G-20 pada tahun 2023.

Kontribusi Indonesia tidak hanya sebatas dalam optimalisasi momentum keanggotaannya di sejumlah organisasi internasional, tetapi juga dalam kegiatan yang sudah rutin dilaksanakan sebagai bentuk komitmen dalam keterlibatan membentuk perdamaian dunia, seperti pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-bangsa (MPP PBB). Indonesia juga secara aktif melakukan diplomasi perdamaian dan kemanusiaan untuk memberikan kontribusi konkrit terhadap penyelesaian masalah. Partisipasi aktif diplomasi perdamaian dan kemanusiaan Indonesia dilaksanakan dalam isu *Rakhine State*, Myanmar; perdamaian di Afghanistan; perdamaian di Palestina; kerja sama dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, termasuk dengan negara-negara di Kawasan Pasifik Selatan; perundingan *Code of Conduct (CoC)* di Laut Cina Selatan; penguatan promosi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di ASEAN melalui ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR); dan *Interfaith, Intermedia, Youth and Culture Dialogue*. (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2020, 55).

Sebagai prioritas tambahan, penguatan infrastruktur diplomasi mengarah pada pembangunan internal Kemlu RI baik secara institusional maupun kualitas SDM. Dalam target kinerja Kemlu RI 2020—2024, indikator penguatan infrastruktur meliputi nilai reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, persentase pejabat Kemlu RI yang memenuhi standar, dan juga persentase sarana dan prasarana yang memadai (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2020, 123). Selain itu, Kemlu RI melakukan transformasi digital dalam rangka mendorong digitalisasi diplomasi untuk meningkatkan efektivitas, kualitas, dan interaksi dalam berbagai pelaksanaan prioritas diplomasi (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019, 11).

Komparasi Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dan Indonesia

Roda diplomasi Indonesia, sebagai negara berkembang, berbeda dengan AS, sebagai negara maju. Kedua negara ini berupaya untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai isu internasional. Namun, prioritas kebijakan luar negeri Indonesia dan AS sangat berbeda.

Indonesia masih berkuat pada diplomasi perbatasan, kedaulatan, dan kebangsaan untuk menunjukkan eksistensi dan mempromosikan kebudayaan Indonesia. Sementara itu, AS sudah mempunyai titik batas negara yang

jelas walaupun pelanggaran batas wilayah kerap terjadi oleh warga negara lain yang ingin mencari penghidupan di AS. Selain itu, Indonesia terus mendorong upaya perlindungan WNI di negara lain yang selama ini masih belum optimal. Hal lainnya adalah upaya penguatan infrastruktur diplomasi yang menunjukkan masih adanya proses pembangunan kekuatan diplomasi Indonesia selayaknya sebagian besar negara berkembang. Sementara itu, AS hanya butuh mendorong optimalisasi kinerja anggota diplomatiknya.

Namun, kedua negara berorientasi pada isu yang sama dalam upaya perdamaian dunia. Sebagaimana dalam isu pelanggaran HAM di Rakhine, Myanmar. Kedua negara berupaya untuk mendorong penanganan pelanggaran HAM tersebut dengan ritme yang berbeda. Indonesia dan Myanmar yang tergabung dalam ASEAN berkomitmen untuk menerapkan prinsip non-intervensi, sehingga Indonesia hanya dapat memperingatkan dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Rohingnya. Sementara itu, AS dengan kekuatan superior menjadi ancaman untuk pemerintahan militer yang sedang berkuasa. Namun, AS tidak dapat bertindak selama kondisi di Myanmar tidak mengganggu negara aliansinya.

Dalam proses perdamaian di Afghanistan, kedua negara berkomitmen dengan partisipasi penuh. AS bersedia menarik pasukannya dan membawa

sejumlah pengungsi keluar dari Afghanistan hingga 31 Agustus 2021. Sementara itu, Indonesia masih memantau kondisi Afghanistan pasca-kudeta yang dilakukan oleh Afghanistan.

Sayangnya, dalam perdamaian di Palestina, Indonesia dan AS berada dalam posisi yang berseberangan. AS memberikan dukungan kepada Israel, sedangkan Indonesia terus menggaungkan kemerdekaan untuk Palestina.

Saat ini, Indonesia sedang berfokus mempersiapkan diri untuk menjadi ketua G-20 dan ASEAN pada tahun 2023. Selain itu, kepemimpinan dan keanggotaan Indonesia sedang aktif di beberapa lembaga PBB. Dengan kata lain, Indonesia sedang mempertahankan eksistensi dan pencapaiannya di tataran internasional, sedangkan AS menyibukkan diri untuk membangun kembali hubungan baik dengan beberapa negara dan organisasi internasional.

Posisi Strategis Indonesia dalam Kebijakan Luar Negeri AS dan Potensi Pengembangan Kerja Sama Indonesia-AS

Tidak ada satupun kebijakan luar negeri AS mengarah pada Indonesia secara spesifik atau regional Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Namun, Indonesia masih berposisi strategis sebagai mitra AS di Kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik—dalam skala cakupan wilayah yang lebih

luas. Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menerapkan demokrasi secara luas dengan proses pengembangan yang masih terus berlanjut. Untuk Pemerintahan Biden yang sedang mengusung demokrasi dalam setiap langkahnya, Indonesia merupakan mitra kerja yang potensial. Apalagi Indonesia mengupayakan penegakan HAM di Kawasan Asia Tenggara melalui AICHR. Berdasarkan konsep *democratic peace*, AS tidak akan pernah menyerang Indonesia.

Reaktivasi partisipasi AS dalam tataran internasional mengindikasikan bahwa Pemerintahan Biden akan secara aktif dengan beberapa kawasan, termasuk Asia Tenggara. Sejak integrasi negara-negara anggota ASEAN pada tahun 2015, Asia Tenggara menjadi salah satu wilayah strategis dan pasar yang menjanjikan bagi AS. Klaim China terhadap Laut China Selatan merupakan alasan lain yang menunjukkan posisi strategis Asia Tenggara di mana Indonesia merupakan salah satu bagiannya. Peranan Indonesia yang sangat penting di Kawasan Asia Tenggara menjadi pertimbangan AS dalam menjalin kerja sama.

Harus diakui, AS bukan merupakan mitra terbaik Indonesia di bidang perekonomian. Namun, setidaknya AS merupakan mitra dagang terbesar Indonesia untuk produk karet, makanan laut, sepatu kulit, garmen, furnitur dan

minyak sawit (Lisbet, 2021, 9). Dengan kebijakan luar negeri di bidang ekonomi yang berorientasi pada peningkatan investasi dan juga pengembangan pasar, Indonesia condong pada Asia dan Afrika yang merupakan pasar baru dunia. Bahkan China, yang kerap berseberangan dengan AS, merupakan salah satu rekan strategis Indonesia dalam pembangunan perekonomian saat ini.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia mendapatkan surplus sekitar \$24,52 milyar (Lisbet, 2021, 9). Bahkan, jika dibandingkan dengan tahun 2019, nilai total perdagangan Januari-November 2020 meningkat sebesar \$16,75 milyar atau setara dengan 3,82% (Lisbet, 2021, 10). Pertumbuhan nilai perdagangan ini cukup menjanjikan di masa mendatang.

Di bidang pertahanan, kerja sama Indonesia dan AS terus meningkat, tetapi tidak untuk teknologi pertahanan. Sebagian peralatan militer Indonesia berasal dari musuh bebuyutan AS, yaitu Rusia. Dengan demikian, kerja sama Indonesia-AS di bidang pertahanan kerap kali hanya bersifat edukatif, seperti latihan bersama dan dialog strategis.

Kondisi ini sesuai dengan prinsip “bermain di atas dua kaki”, tetapi menyulitkan Indonesia untuk meningkatkan hubungan dengan AS secara implementatif. Namun, kebijakan Indonesia ini juga menjadi salah satu nilai strategis dari eksistensi Indonesia dalam

politik luar negeri AS. Untuk menjaga tidak terbentuk aliansi tandingan, AS harus memastikan bahwa Indonesia masih dalam posisi netral walaupun menjalin kerja sama komprehensif dengan China dan Rusia.

Walaupun pemerintahan AS dipegang oleh Joe Biden yang mempunyai pemikiran sejalan dengan Barack Obama, Indonesia tidak mempunyai peluang sebesar periode kepemimpinan Presiden AS ke-44 tersebut. Kondisi ini juga didukung dengan kebijakan pemimpin AS dan Indonesia yang berfokus pada perbaikan kondisi domestik pasca-pandemi. Kondisi ini setidaknya akan berlangsung hingga tahun 2022, saat AS sudah keluar dari masa transisi pemerintahan.

Kesempatan Indonesia untuk meningkatkan kerja sama dengan AS terbuka lebar dengan posisinya sebagai Ketua ASEAN 2023 dan Ketua G-20 2022. Kedua tahun ini menyediakan peluang emas Indonesia untuk membangun landasan kerja sama dengan negara strategis, termasuk AS. Apalagi saat itu, Pemerintahan Biden juga sudah menunjukkan karakter aslinya. Dengan demikian, Indonesia dapat melakukan “lompatan” yang baik untuk kerja sama progresif dengan AS.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Walaupun sudah menduduki tampuk kekuasaan, Presiden Joe Biden masih

belum menunjukkan warna asli kepemimpinannya karena saat ini pemerintahan AS berada pada masa transisi. Warna asli Pemerintahan Biden setidaknya dapat terlihat pada tahun 2022. Pada saat itu, semua negara, termasuk Indonesia, dapat menentukan langkah diplomatik untuk meningkatkan kerja sama dengan AS. Walaupun demikian, dengan dirilisnya prioritas kebijakan AS yang condong ke dalam perbaikan kondisi domestik dan kerja sama dengan beberapa entitas internasional, pemerintahan Biden sudah menunjukkan reaktivasi keterlibatan AS di tataran internasional.

Untuk saat ini, reaktivasi AS tidak memberikan peluang apapun bagi Indonesia. Namun, dalam kepemimpinannya di ASEAN tahun 2023 dan tahun 2022 dalam di G20 tahun 2022, Indonesia mempunyai peluang yang sangat baik untuk mempererat hubungan kerja sama dengan AS. Tahun 2022—2023 menjadi momen emas untuk Indonesia membangun landasan kerja sama yang lebih progresif dengan AS, termasuk di bidang ekonomi dan pertahanan yang saat ini masih didominasi oleh China dan Rusia.

Dengan kondisi dan prioritas kebijakan luar negeri AS saat ini, penulis merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk melakukan:

- a. pemeliharaan hubungan kerja sama dengan AS yang sudah terjalin;
- b. pemantauan perkembangan situasi internasional dan juga kebijakan internasional AS;
- c. pemetaan dan perencanaan kerja sama internasional, khususnya yang berkaitan dengan negara superior, seperti AS, Rusia, dan China;
- d. pembentukan forum dialog sebagai wadah membahas isu-isu terkini, termasuk isu pertahanan dan perubahan iklim; dan
- e. pelaksanaan kunjungan kenegaraan kepala negara dan pemerintahan untuk mencapai kesepakatan terkait situasi di Indo-Pasifik dan upaya penanganan perubahan iklim.

Daftar Pustaka

- Alden, C., & Aran, A. (2017). *Foreign Policy Analysis: New Approaches*. *Foreign Policy Analysis* (2nd ed.). Routledge Taylor & Francis Group. <https://doi.org/10.4324/9781315442488>
- Berretta, A., Diegelmann, D., Hübner, C., & Stopfer, N. (2021). In the Run-Up to the Climate Summit: Can the USA Set the Tone for International Climate Protection with its New Claim to Leadership ? (Issue April).
- Biden, J. R. J. (2020). Why America Must Lead Again: Rescuing U.S. Foreign Policy After Trump. *Foreign Affairs*. <https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-01-23/why-america-must-lead-again>.
- Dalton, T. (2021). The Biden Administration and a New Approach to

- Denuclearization? *RINSA Forum*, 72, 1–4.
- Hudson, V. M. (2007). *Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory*. USA: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019). *Penyampaian Prioritas Politik Luar Negeri Republik Indonesia 2019--2024*. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2020). *Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 2020-2024*. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- Lisbet. (2021). The United State Policy Directions under President Joe Biden. *INFO Singkat*, 13(3), 7–12.
- Matthew, P. (2021). The Emerging Contours of President Biden's Foreign Policy (Issue June). *European Parliamentary Research Service*.
- Mintz, A., & DeRouen, K. (2010). *Understanding Foreign Policy Decision Making*. Cambridge : Cambridge University Press.
- Rattner, R., & Whitmore, B. (2021). President Biden 's Africa Policy. *LSE IDEAS Strategic Update*.
- Rosenau, J. (1968). Comparative Foreign Policy Analysis: Fad, Fantasy, or Field? *International Studies Quarterly*, 12(3), 296–329.
- Sasakawa, USA. (2021). *The Biden Administration's Indo-Pacific Policy*. USA : Sasakawa.
- Shesgreen, D., & Hjelmgaard, K. (2021). Biden puts a twist on ' America First ' even as He Moves to Unravel Trump's Foreign Policy. USA Today. <https://www.usatoday.com/in-depth/news/politics/2021/02/25/joe-bidens-foreign-policy- america-first-twist/4345647001/>
- Soare, S. R. (2021). Biden's Security Policy: Democratic Security or Democratic Exceptionalism? *Intereconomics*, 56(1), 14–20. <https://doi.org/10.1007/s10272-021-0945-1>
- The Biden-Harris Administration Immediate Priorities. (2021). The White House. <https://www.whitehouse.gov/priorities/>
- The White House Briefing Room. (2021). Remarks by President Biden on America's Place in the World. The White House. <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/02/04/remarks-by-president-biden-on-americas-place-in-the-world/>.
- Usher, B. P. (2021). What Biden's Foreign Policy "Reset" Really Means. BBC News. <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55945942>.